

## **Analisis Penyajian Laporan Keuangan Syariah Pada Baitul Mal Provinsi Aceh**

**BUSTAMAM**

*Universitas Syiah Kuala*

**RIDWAN IBRAHIM**

*Universitas Syiah Kuala*

**DEDY SAPUTRA**

*Universitas Syiah Kuala*

### **Abstract**

*The objective of this research is to analyze the application Sharia financial statement at Baitul Mal Aceh. This research is qualitative research with descriptive analysis method that aims to provide an overview of research state of the object based on existing data and provide a comparative analysis between SFAS 109 is applied to the Baitul Mal Aceh. The result show that in general the Baitul Mal Aceh has adaopted SFAS 109. The financial statements at the Baitul Mal has adopted SFAS 109 which consists of the consolidated financial position, statement of activities, cash flow statement and notes to financial statements.*

**Keywords:** *Baitul Mal, Financial Statements*

### **1. Pendahuluan**

Pesatnya perkembangan dan kesuksesan sistem syariah terutama dalam ekonomi telah membuat masyarakat memberikan perhatian khusus terhadap ekonomi syariah. Indonesia juga merupakan negara dimana terus bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah, tidak hanya berpusat pada bank. Semakin lengkapnya elemen lembaga keuangan syariah ditandai juga dengan kemunculan baitul mal. Lembaga keuangan syariah yang bermunculan hari ini telah memberikan perhatian lebih dari berbagai pihak terhadap lembaga keuangan syariah.

Praktik akuntansi dalam hal lembaga keuangan syariah pun mutlak diperlukan, dalam hal ini praktik akuntansi syariahlah yang mengambil peran. Seiring dengan melaju kecanggihannya praktik akuntansi syariah yang dibuktikan dengan pesatnya perkembangan ekonomi syariah di Indonesia kearah tren yang membanggakan, sangat penting rasanya ada aturan-aturan baku yang diterima secara umum.

Ikatan Akuntan Indonesia pun sejauh ini telah menerbitkan sembilan standar terkait dengan Akuntansi syariah, yaitu PSAK 101 (penyajian laporan keuangan syariah), PSAK 102 (murabahah), PSAK 103 (salam), PSAK 104 (isthisna'), PSAK 105 (mudharabah), PSAK 106 (musyarakah), PSAK 107 (ijarah), PSAK 108 (penyelesaian hutang piutang murabahah bermasalah), PSAK 109 (zakat, infak, sedekah). Lembaga keuangan syariah beberapa waktu ini terbukti banyak telah mendongkrak kesejahteraan masyarakat dengan mekanisme sistem yang diterapkannya. Hal inilah yang membuat

banyak masyarakat mulai beralih ke sistem syariah sebagai alternatif, baik dalam peminjaman pembiayaan permodalan usaha, simpan, pinjam, dan penyaluran zakat.

Baitul mal merupakan sebuah lembaga keuangan syariah yang mengelola keuangan masyarakat dan menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam sistim pengelolaan keuangannya. Baitul mal sendiri sangat diperlukan dalam menjangkau perekonomian rakyat terutama pada pengembangan masyarakat miskin dan lemah yang sering tidak terjangkau oleh lembaga keuangan lain. Menurut Sudarsono (2003: 84) menyatakan bahwa baitul mal adalah lembaga keuangan yang dikhususkan untuk menyimpan harta kekayaann kaum muslimin, yang kegiatannya lebih mengarah kepada usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang bersifat non-profit yakni dana ZIS (zakat, infak, dan sedekah ).

Mulai diterimanya bisnis syariah dan lembaga keuangan syariah yang lainnya termasuk didalamnya baitul mal di masyarakat, sudah pasti lembaga keuangan yang berbasis syariah mempunyai alat untuk melaporkan kondisi keuangan dan kinerja lembaganya terkait masalah ini. Dalam hal ini yang memegang peran dalam hal informasi tentunya laporan keuangan lembaga tersebut. Laporan keuangan inilah yang kemudian akan menjadi bahan informasi bagi pemakainya (Syafi, 2008: 201). Laporan keuangan yang berisi berbagai informasi tersebut hendaknya dapat dimengerti oleh para pemakainya, terutama bagi pihak yang berkepentingan dalam membuat suatu keputusan.

Baitul mal dalam hal ini berkepentingan menyajikan laporan keuangan yang memadai secara baik, sebab laporan keuangan dipergunakan oleh berbagai pengguna dengan beberapa kepentingannya. Baitul mal sendiri merupakan lembaga pihak (*al jihat*) yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara, seperti menangani harta yang diterima negara dan mengalokasikannya bagi kaum muslim yang berhak menerimanya (Zallum, 2002: 5). Tentunya masyarakat juga berhak mendapatkan laporan yang benar dan memadai karena masyarakat juga salah satu pemakai laporan keuangan (Standar Akuntansi Keuangan, 2009). Sebagaimana diterangkan, pengguna laporan keuangan baitul mal meliputi pemerintah, akuntan publik, dan masyarakat (Ridwan, 2004: 224). Pemerintah selaku pemberi izin operasional membutuhkan laporan keuangan sebagai bahan pertimbangan dalam pengawasan dan pembinaannya. Akuntan publik sebagai lembaga profesional di bidang audit berkepentingan untuk memberikan pernyataan tentang kinerja keuangan, sehingga akan semakin meningkatkan *performance* baitul mal. Adapun yang paling berkepentingan langsung terhadap penerbitan laporan keuangan baitul mal sesungguhnya adalah masyarakat itu sendiri. Laporan keuangan tersebut menjadi sangat strategis, dalam rangka meningkatkan kepercayaan para calon penyeter dana.

Kehadiran Baitul Mal Provinsi Aceh sendiri bukanlah hal yang baru, dimulai dengan cara penerapan yang tradisional sampai ke tahap pengelolaan melalui sebuah lembaga pengelolaan keuangan yang moderen. Baitul mal di Aceh lahir sehubungan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang merupakan tindak lanjut perjanjian MoU (*Memorandum of Understanding*) Helsinki (Saputra: 2010). Baitul Mal Provinsi Aceh merupakan satu-satunya lembaga penghimpun dana ZIS yang bernaung di dalam tataran pemerintahan daerah. Masuknya lembaga pengelola dana ZIS ini ke tataran pemerintahan membuat pengelolaan baitul mal juga mengikutsertakan pemerintah di dalamnya.

Berdasarkan pada gambaran latar belakang penelitian, maka rumusan masalah yang menjadi bahasan utama yaitu Bagaimana penyusunan laporan keuangan Baitul Mal Aceh, Apakah penyusunan laporan keuangan Baitul Mal Aceh telah sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku umum.

## 2. Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

### Konsep Zakat, Infaq, Sadaqah

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* 'keberkahan', *al-namaa* 'pertumbuhan dan perkembangan', *al-thahharatu* 'kesucian' dan *ash-shalahu* 'keberesan'. Sedangkan secara istilah zakat ialah nama pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu (Mujahidin, 2007:7).

Allah SWT berfirman dalam *Al-Quran* surat *At Taubah* 103: Artinya: "Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi tentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui." Pengertian diatas memberikan kita suatu konsep dimana zakat bersifat wajib bagi setiap muslim, dan zakat di ambil dari sebahagian harta setiap muslim. Seyogyanya ketika seorang muslim telah diperintahkan dalam *Al-Quran* untuk menyisihkan sebagian harta, maka perintah tersebut adalah bersifat mengikat dan bukanlah sebuah anjuran. Senada dengan hal tersebut Nurhayati (2011:278) menyebutkan bahwa zakat merupakan suatu kewajiban muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak, sehingga seorang muslim tidak dapat memilih untuk membayar zakat atau tidak. Ketika harta setiap muslim telah mencapai *hisab* (batas) maka muslim tersebut harus menyisihkan hartanya, hal inilah yang disebut zakat.

*Infaq* adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Infak atau *infaq* berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Infak ada yang wajib dan ada yang sunah. Infak wajib diantaranya adalah zakat, *kafarat*, dan *nadzar*. Sedangkan Infak sunah diantaranya adalah infak kepada fakir miskin sesama muslim, infak bencana alam, dan infak kemanusiaan. Menurut PSAK No.109, *infaq/shadaqah* adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.

*Shadaqah* adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir-miskin, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima *shadaqah*, tanpa disertai imbalan, tanpa paksaan, tanpa batasan jumlah, kapan saja dan berapapun jumlahnya. Makna sedekah memiliki dimensi yang sangat luas, tidak hanya bagi dimensi memberikan sesuatu dalam bentuk harta tetapi juga dapat berupa berbuat kebajikan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain (Nurhayati, 2011:279) *Shadaqah* ini hukumnya adalah sunah, bukan wajib. Karena itu, untuk membedakannya dengan zakat yang hukumnya wajib, para fuqaha menggunakan istilah *shadaqah tathawwu'* atau *ash-shadaqah an-nafilah*.

### Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan, yang dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan hanya untuk para pemilik (Baridwan, 1992:17). Soemarso (2004:139) mengatakan laporan keuangan merupakan hasil akhir dari siklus akuntansi yang berisi tentang Neraca, Laporan Laba Rugi, dan Laporan Perubahan Modal. Sedangkan menurut PSAK No.1 laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja suatu entitas.

Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi: aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan

kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan arus kas (iaiglobal.or.id).

### **Komponen Laporan keuangan**

Laporan Keuangan yang valid hendaknya memiliki komponen-komponen yang lengkap yang akan disajikan kepada pemakai laporan keuangan guna menghindari kebiasaan informasi yang akan diterima oleh pengguna untuk dikonsumsi atau sebagai pedoman pengambilan keputusan. Adapun komponen-komponen lengkap mengenai Laporan Keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum secara rinci telah dijelaskan dengan detail dalam PSAK.

Menurut PSAK No 1 (2009) Komponen laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini:

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
2. Laporan laba rugi komprehensif selama periode
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode; (d) laporan arus kas selama periode;
4. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lainnya; dan
5. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya

Bedasarkan hal di atas, hendaknya laporan keuangan yang disajikan oleh suatu perusahaan atau organisasi memenuhi kriteria seperti yang tercantum dan terdiri atas komponen tersebut

### **Laporan Keuangan Zakat PSAK 109**

Dana yang dikumpulkan oleh organisasi pengumpul zakat tentunya bersumber dari masyarakat. Pertanggungjawaban dari penggunaan dana tersebut tentunya sangat dinantikan oleh masyarakat sebagai penyalur utama. Tentunya hal tersebut dapat di lihat dari penyampaian laporan keuangan dengan tepat, baik, dan benar. Sesuai dengan tujuan laporan keuangan sendiri antaranya untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Laporan keuangan yang baik dimulai dari pencatatan yang baik dimana dapat dipertanggungjawabkan dan di terima umum. Informasi yang baik harus dimulai dari pencatatan yang baik pula, yang karenanya baitul mal juga membutuhkan akuntansi. Dengan menggunakan sistem informasi akuntansi zakat, organisasi pengelola zakat dapat mencatat dan melaporkan arus zakat dengan baik (Nikmatuniayah: 2012).

Standar akuntansi zakat sesungguhnya mempunyai aturan tersendiri dengan melihat sifat zakat ini, standar akuntansi akan mengikuti bagaimana harta dinilai dan diukur (Harahap, 2001:322). Akuntabilitas organisasi pengelola zakat ditunjukkan dalam laporan keuangan tersebut, untuk bisa disahkan sebagai organisasi resmi, lembaga zakat harus menggunakan sistem pembukuan yang benar dan siap diaudit oleh akuntan publik. Ini artinya standar akuntansi zakat mutlak diperlukan bagi lembaga pengelola zakat.

Penyesuaian demi penyesuaian dilakukan oleh dewan standar akuntansi terhadap akuntansi zakat. Tahun 2010 dikeluarkannya suatu standar terhadap lembaga zakat yaitu PSAK 109 setelah sebelumnya diterbitkan berupa *Exposed Draft* untuk PSAK tersebut. Standar inilah yang digunakan lembaga pengelola zakat untuk membuat suatu proses akuntansi yang berterima umum, karena dalam PSAK No. 109,

akuntansi zakat bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah.

Sesuai dengan PSAK 109 (2010) komponen laporan keuangan amil zakat yang lengkap terdiri dari :

1. Laporan posisi keuangan
2. Laporan perubahan dana
3. Laporan perubahan asset kelolaan
4. Laporan arus kas
5. Catatan atas laporan keuangan

### **3. Metode Penelitian**

#### **Desain Penelitian**

Desain penelitian menurut Sekaran (2009:152) penting sehingga data penelitian yang diperlukan dapat dikumpulkan dan dianalisis untuk menemukan solusi. Pentingnya desain penelitian juga sebagai kontrol peneliti terhadap tinggat manipulasi dan intervensi dalam melakukan penelitian, juga termasuk bagaimana data dikumpulkan.

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penyajian laporan keuangan Baitul Mal. Dilihat dari informasi datanya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang datanya tidak dapat diuji dengan statistic (Kountur, 2004:84). Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang menggambarkan serta menjelaskan laporan keuangan baitul mal. Objek penelitian ini adalah aplikasi laporan keuangan pada Baitul Mal Provinsi Aceh. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Baitul Mal Provinsi Aceh yang bertempat di jalan T. Nyak Arief, No. 148 - A Gampong Prada, Banda Aceh

Berdasarkan kondisi lingkungan penelitian dan tingkat keterlibatan peneliti, maka penelitian ini dilakukan dalam situasi yang tidak diatur, yaitu situasi di mana pekerjaan berproses secara normal (Sekaran, 2011:170). Tingkat intervensi peneliti dalam penelitian ini adalah intervensi minimal dimana peneliti hanya mengumpulkan data tanpa ikut campur dalam kegiatan organisasi. Unit analisis merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis data selanjutnya (Sekaran, 2011:173). Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah individual, yaitu laporan keuangan dari Baitul Mal Aceh. Horizon waktu yang digunakan adalah *cross-sectional*, dimana sebuah studi dapat dilakukan dengan data yang hanya sekali dikumpulkan pada suatu periode atau satu tahap.

#### **Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari kantor Baitul Mal Provinsi Aceh yang beralamat di jalan Teuku Nyak Arief Komplek Keistimewaan Aceh, Gampong Prada, Banda Aceh. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Menurut Sekaran (2011:70), data primer merupakan informasi yang diperoleh dari tempat aktual terjadi peristiwa, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber yang ada, yaitu data yang telah ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan.

#### **Metode Analisis**

Alat analisis yang akan disusun gunakan adalah deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh akan disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Penelitian deskriptif ini tidak membutuhkan hipotesis. Tujuannya ialah memberikan gambaran subjek penelitian sebagaimana

adanya. Dalam hal ini, penulis menganalisis dan menjelaskan hal-hal yang berkenaan dengan Baitul Mal Aceh terutama keadaan laporan keuangannya. Data yang akan dianalisis oleh penyusun yaitu melalui tahap-tahap antara lain:

1. Mengidentifikasi format penyusunan laporan keuangan yang digunakan Baitul Mal Aceh.
2. Membandingkan format yang digunakan dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku umum.

Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan membandingkan antara teori dengan praktik. Pada analisis ini dilakukan perbandingan antara data yang didapatkan dari lapangan dengan data yang berasal dari studi kepustakaan sebagai landasan teoretis sehingga dapat diambil kesimpulan mengenai kesesuaian antara laporan keuangan yang disusun oleh Baitul Mal Aceh dengan teori akuntansi yang berlaku umum yang terdapat pada PSAK.

#### **4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan Penyusunan Laporan Keuangan Baitul Mal Aceh**

Baitul Mal Aceh menerapkan kebijakan akuntansi dimulai dari pengumpulan bukti-bukti transaksi yang diperoleh kemudian dicatat oleh bendahara penerimaan menggunakan sistem kas dan setara kas (*cash basis*). Zakat dan infak disetorkan oleh masyarakat langsung kepada *counter* penerimaan yang ada di baitul mal. Hal ini juga berlaku untuk penyaluran yang dilakukan secara langsung jika ada masyarakat yang memerlukan dana zakat dan datang ke baitul mal akan dicatat pula oleh bendahara penyaluran.

Periode yang diterapkan sebagai kebijakan oleh Baitul Mal Aceh mengikuti periode akuntansi satu tahun, yaitu dimulai dari satu Januari hingga 31 Desember setiap tahunnya. Para akuntan yang bertanggung jawab terhadap laporan keuangan pengelolaan zakat dan infak Baitul Mal Aceh akan mengumpulkan rekapitulasi penerimaan dan penyaluran zakat serta infak yang ada pada bendahara penerimaan dan penyaluran di setiap akhir periode.

Para akuntan juga sekaligus melakukan rekapitulasi rekening koran dari berbagai rekening penerimaan zakat dalam hal ini ada beberapa bank yang digunakan oleh baitul mal untuk membuka rekeningnya, yang selanjutnya para akuntan juga meminta laporan jumlah aset yang ada pada kesekretariatan Seperti yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya bahwa Baitul Mal Aceh sebagai sebuah lembaga daerah yang kegiatan operasionalnya dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), maka Baitul Mal Aceh membuat dua laporan keuangan yang berbeda setiap tahunnya, yaitu laporan keuangan menurut SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) yang merupakan realisasi anggaran yang diterima dari APBA, serta laporan keuangan PSAK 109 yang memuat gambaran pengelolaan zakat dan infak yang merupakan tujuan utama pendirian Baitul Mal Aceh. Oleh karena itu, yang akan dibahas pada sub bab ini adalah laporan keuangan yang kedua, yaitu yang menyangkut pengelolaan zakat, infak dan sedekah menurut PSAK 109.

Mengacu pada PSAK 109 Baitul Mal Aceh membuat beberapa laporan yaitu :

1. Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan Perubahan Dana
3. Laporan Arus Kas
4. dan Catatan Atas Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan pada Baitul Mal Aceh dilakukan oleh staf bagian keuangan yaitu tenaga akuntan yang bertanggung jawab terhadap pembukuan dan pelaporan keuangan Baitul Mal Aceh.

### **Penerapan Laporan Posisi Keuangan PSAK 109 pada Baitul Mal Aceh**

Baitul Mal Aceh dalam menyajikan laporan posisi keuangannya berusaha untuk mengikuti ketentuan pada PSAK 109. Bagian aset yang disajikan seperti pada tabel di atas telah sesuai seperti pada pos pada PSAK 109, terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar.

Pos liabilitas dalam tabel tidak terisi oleh nilai ekonomi, dikarenakan Baitul Mal Aceh memang tidak mempunyai hutang pada badan-badan lain atau pihak-pihak yang terkait. Dalam hal pos liabilitas ini pun Baitul Mal Aceh telah mengikuti PSAK 109.

Terdapat perbedaan yang penulis jumpai pada pos saldo dana, dimana Baitul Mal Aceh menyajikan dana zakat, dana infak, dan dana lainnya. Baitul Mal Aceh tidak memasukkan pos dana amil. Baitul Mal Aceh berasumsi dana amil telah termasuk kedalam bagian pos dana zakat sehingga pihak pembukuan dan keuangan Baitul Mal Aceh tidak lagi mencantumkan pos dana amil.

Hal ini tentunya berbeda dengan yang tertulis pada PSAK 109 (2010) pada paragraf 20 dimana bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil, sedangkan pos dana zakat akan berkurang ketika zakat telah disalurkan kepada *mustahiq* termasuk amil. Sebagaimana yang disampaikan dalam PSAK 109 (2010) paragraf 16 yang mengatakan zakat yang disalurkan kepada mustahik termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar a) jumlah yang diserahkan, jika diserahkan dan b) jumlah tercatat jika dalam bentuk aset non kas.

### **Penerapan Laporan Perubahan Dana PSAK 109 pada Baitul Mal Aceh**

Baitul Mal Aceh menyajikan laporan perubahan dana sebagai tolak ukur kinerja, baik dalam penerimaan dana zakat, infak, sedekah maupun dalam penyalurannya. Pengeluaran dana yang masuk ke Baitul Mal Aceh selama satu periode.

Pihak baitul mal menyajikan beberapa pos dalam laporan perubahan dana yaitu:

1. Pos Dana Zakat
2. Pos Dana Infak/Sedekah
3. Pos Dana Lainnya

Perbedaan penyajian yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh dengan PSAK 109 adalah pada pos dana lainnya, dimana pada PSAK 109 penerimaan lain dan beban administrasi lainnya disajikan pada pos dana amil. Baitul Mal Aceh tidak menyajikan pos dana amil dan menggantinya dengan pos dana lainnya.

Pertimbangan yang digunakan pihak baitul mal dikarenakan dana amil yang seharusnya disalurkan dan menjadi penambah dana amil sesuai PSAK 109 telah dimasukkan (*include*) kedalam poin penyaluran kepada *mustahiq* pada pos dana zakat. Dalam hal ini *mustahiq* (yang didalamnya termasuk amil) yang dimaksud merupakan amil yang bertugas sebagai pengumpul zakat pada dinas-dinas dan lembaga-lembaga terkait. Amil yang bertugas itu disebut UPZ (Unit Pengumpul Zakat), para UPZ inilah yang nantinya akan disalurkan dana zakat sebagai amil.

Dikarenakan Baitul Mal Aceh merupakan suatu dinas dalam pemerintahan Propinsi Aceh yang bersifat independen, maka seluruh biaya operasional dan gaji para pegawai Baitul Mal Aceh di biayai dengan dana yang bersumber dari PEMDA (Pemerintah Daerah).

### **Penerapan Laporan Arus Kas pada Baitul Mal Aceh**

Baitul Mal Aceh menyajikan laporan arus kas yang menggambarkan arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan juga

transaksi kas dan setara kas organisasi, baik kas masuk ataupun kas keluar sehingga dapat diketahui kenaikan dan penurunan kas dan setara kas.

Pihak Baitul Mal Aceh telah menyajikan laporan arus kas secara relevan, seperti yang di ungkapkan pada paragraf 9 PSAK 2 (2009) dimana Laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasi menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

#### **Penerapan Laporan Perubahan Aset Kelolaan pada Baitul Mal Aceh**

Baitul Mal Aceh belum menyajikan laporan perubahan aset kelolaan, dikarenakan sampai dengan periode ini Baitul Mal Aceh belum memiliki aset kelolaan tersebut. Semua aset yang dimiliki oleh Baitul Mal Aceh adalah milik Negara dan sudah terdata pada dinas terkait. Pendataan aset langsung dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pihak Baitul Mal Aceh sempat berencana untuk membangun aset kelolaan berupa gedung serbaguna, tetapi hal tersebut tidak terealisasi sampai periode ini dan akan di usahakan terealisasi pada periode yang akan datang.

#### **Penerapan Catatan Atas Laporan Keuangan pada Baitul Mal Aceh**

Catatan atas laporan keuangan pihak Baitul Mal Aceh, mengungkapkan penjelasan pada pos-pos pada laporan keuangan secara sistematis. Baitul Mal Aceh juga menyajikan penjelasan atas informasi umum Baitul Mal, ikhtisar kebijakan akuntansi penting.

### **5. Kesimpulan, Implikasi dan Keterbatasan Penelitian**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Laporan Keuangan Baitul Mal Aceh disusun atas dasar harga perolehan (nilai historis) dengan menggunakan basis akuntansi kas (*cash basis*). Laporan Arus kas disusun menggunakan metode langsung dan dikelompokkan berdasarkan kegiatan operasi, investasi dan pendanaan. Penyusunan laporan keuangan dilakukan oleh staf akuntan Baitul Mal Aceh pada setiap periode yang berakhir 31 Desember setiap tahunnya.
2. Secara keseluruhan pihak Baitul Mal Aceh telah menerapkan sistem pelaporan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yaitu PSAK 109, tetapi terdapat beberapa hal yang tidak sesuai diantaranya :
  - a. Tidak adanya pos Dana Amil pada Laporan posisi keuangan dan perubahan dana, diganti dengan pos dana lainnya.
  - b. Tidak disajikannya Laporan Perubahan Aset Kelolaan, dikarenakan sampai saat ini Baitul Mal Provinsi Aceh belum memiliki aset kelolaan.

#### **Keterbatasan**

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Objek penelitian ini tidak mencerminkan kondisi Laporan Keuangan pada lembaga pengelola zakat yang lainnya.
2. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2013 ketika Baitul Mal Aceh belum memiliki SOP (*Standard Operating Procedure*) pelaporan keuangan.
3. Keterlambatan audit atas Laporan Keuangan yang dikeluarkan, laporan audit tersebut baru dikeluarkan pada awal Oktober.

### Saran

1. Kepada peneliti selanjutnya untuk dapat meluaskan objek penelitian pada lembaga zakat yang lainnya seperti Rumah Zakat, Dompot Duafha, dan lain sebagainya.
2. Jika peneliti selanjutnya ingin meneliti dengan Baitul Mal Aceh sebagai objeknya, maka penulis menyarankan agar meneliti mengenai proses siklus akuntansi yang terjadi pada Baitul Mal Aceh.
3. Kepada Baitul Mal Aceh untuk dapat segera menyusun SOP pelaporan keuangan sehingga penyusunan laporan keuangan periode selanjutnya menjadi lebih mudah dan sedapat mungkin disesuaikan dengan PSAK 109. Baitul Mal juga diharapkan dapat menambah tenaga akuntan dan merancang sistem akuntansi terkomputerisasi sehingga pencatatan transaksi hingga pelaporannya dalam bentuk laporan keuangan menjadi lebih mudah.

### Daftar Pustaka

- AR, Soemarsoe. 2004. *Akuntansi suatu pengantar*. Jakarta: Salemba Empat. hal:139.
- Baitul Mal Aceh. 2010. *pengembangan pengelolaan zakat di Aceh*. Banda Aceh: tanpa penerbit.
- Baitul Mal Aceh. 2012. *Profil Baitul Mal Aceh*. Melalui <http://baitulmal.acehprov.go.id/profil.php>). Diakses tanggal 5 November 2013.
- Baridwan, Zaki. 1992. *Akuntansi Intermediate*. Yogyakarta: BPFE: 17.
- C. S. Warren, James M. Reeve, Philip E. Fees. 2006. *Pengantar Akuntansi* Jakarta: Salemba Empat.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2008. *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam- Direktorat Pemberdayaan Zakat. Jakarta: 6-10.
- Fanani Z Rachmawati, Affandi R, dkk. 1995. *Panduan Teknik Manajemen Operasional BMT*. Yogyakarta: PRPEK LPM UII: 5.
- Farida, Prihatin. 2005 *Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia: 75.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2001. *Menuju Perumusan teori Akuntansi Islam*, Jakarta:Pustaka Quantum: 322.
- Hartanto Widodo, dan Teten Kustiawan. 2001, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Orang Pengelola Zakat*. Jakarta: IMZ: 27.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika. Hal 143.
- Ikatan Akuntan Indonesia, *PSAK NO. 109*, Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Ikatan Akuntan Indonesia, 2010.
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Psak no. 109*, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2010. Paragraf 20.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2008. *PSAK No. 109*, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia,
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2012. *PSAK 109* (Diakses tanggal 20 Oktober 2013).
- Keputusan Menteri Agama (KMA), *UU No. 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*.
- Kountur, Ronny. 2004. *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Edisi 2. Jakarta: PPM: 84.

- Lutviana, Nurul Isnaini. 2009. *Evaluasi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat*, Diakses pada tanggal 22 juli 2013, <<http://lib.uin-malang.ac.id/thesis/fullchapter/05610033-nurul- isnaini-lutviana.ps>>
- Mujahidin Ahmad. 2007. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Grafindo Persada: 7.
- Narbuko, Cholid dan Abu ahmadi, 2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nikmatunniyah disamapikan pada proseiding SNA PP 2012 SosEkHum Akuntabilitas
- Nurhayati Sri, Wasilah. 2011. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Pasal 2 Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh
- Pasal 3 Ayat 1 & 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- Pasal 4 Ayat 1 & 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Mal Wa Tammil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press: 224.
- Saputra, Hendra. 2010 *Tanggung Jawab Baitul Mal Dalam Mencerdaskan Kehidupan Bangsa*, Disampaikan dalam Muktamar VII Pengurus Besar Persatuan Dayah Inshafuddin 01- 03 Oktober 2010 M/22 – 24 Syawal 1431 H
- Sekaran, Uma, 2011. *Metodologi Peelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudarsono, Heri.2003 *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta : Ekonosia Kampus Fak. Ekonomi UII: 84.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta: 168
- Syafri Harahap, Sofyan, 2008. *Analisa Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Zallum, Abdul Qadim. 1983. *Al Amwal Fi Daulah Al Khilafah*. Cetakan I. Beirut:Darul ‘Ilmi Lil Malayin: 210.
- Zallum, Abdul Qadim.2002. *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah: 5.